

Dual Track Poverty Alleviation: Kartu Menuju Sehat (KMS) and Social Capital

Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Modal Sosial

Fadlan Habib^{1,2} dan Zaky Yulian Tri Laksono²

¹ Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

² Mahasiswa Prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
Universitas Gadjah Mada

Jl. Tevesia Bulaksumur Yogyakarta, 55281

E-mail: fadlan_habib@ugm.ac.id

HP: 081248434154

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara program perlindungan sosial dan modal sosial yang ada di masyarakat perkotaan. Adapun lokus penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Kegagalan pemerintah dalam penentuan targeting program perlindungan sosial harus dibayar mahal dengan munculnya potensi konflik yang berakibat pada renggangnya solidaritas sosial. Kondisi ini dipahami betul oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam implementasi Program Kartu Menuju Sehat (KMS). Program ini dinilai berhasil dalam mereduksi kesalahan targeting program dan potensi konflik disebabkan karena adanya partisipasi warga dalam proses penentuan dan kontrol program. Modal sosial yang sudah terbangun lama di masyarakat harus terus didayagunakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai solidaritas sosial, kepercayaan, dan saling pengertian harus terus ditumbuhkan untuk mewujudkan collective action pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin menguatnya peran negara dalam menghadirkan program perlindungan sosial tidak serta merta menggeser relasi modal sosial resiprokal yang sudah tumbuh di masyarakat. Untuk itu, pelibatan masyarakat mutlak diperlukan agar implementasi program perlindungan sosial justru tidak memicu munculnya konflik sosial, selain itu perlu adanya sinergitas basis data terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta sector swasta dalam implementasi program perlindungan sosial, sehingga proses pengentasan kemiskinan akan cepat terselesaikan.

Kata Kunci: *perlindungan sosial, modal sosial, relasi sosial, solidaritas sosial*

Abstract

This paper aims to determine the relationship between social protection programs and social capital in urban society. the study was conducted in Yogyakarta. Failure to arrange targets for social protection programs must be paid dearly with the potential for conflict. This conflict will result in the loosening of social solidarity. This condition is well understood by the Government of Yogyakarta in the implementation Program Kartu Menuju Sehat (KMS). This program is considered successful in reducing errors in targeting programs and potential conflicts. The presence of participation in the community shows that they can determine and control the program. Social capital that has been built for a long time in the community must be used as a force to realize community welfare. The values of social solidarity, trust, and mutual understanding must be cultivated continuously to realize the collective action of the community. This study uses a mixed method approach in answering the proposed problem formulation. The result of the study shows that the increasing role of the state in providing social protection program did not shift the reciprocal relation of social capital that has grown in the community. Therefore, community involvement is absolutely necessary so that the implementation of social protection programs do not actually trigger social conflicts, besides the need for integrated database synergy between the central and regional governments and the private sector in the implementation of social protection programs, so that the process of poverty alleviation will be quickly resolved.

Keywords: *social protection, social capital, social relations, social solidarity*

A. Pendahuluan

Penelitian mengkaji tentang relasi program perlindungan sosial dan modal sosial pada masyarakat perkotaan dalam kaitannya dengan transformasi modal sosial. Masyarakat Indonesia secara tradisional memiliki nilai modal sosial yang sangat kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan di masyarakat seperti gotong royong, siskamling, dan arisan. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai modal sosial sudah mulai berkurang manakala masyarakat semakin modern dan individualistik (Juul, 2010). Kondisi ini berdampak pada ikatan modal sosial yang awalnya dibangun dalam rangka katup penyelamat dalam pertukaran sosial resiprokal harus tergantikan oleh pertukaran yang rasional instrumental (Widegren, 1997). Kondisi ini menyebabkan *safety nets* dari komunitas bertransformasi menjadi menguatnya peran negara dan swasta melalui instrumentasi kebijakan perlindungan sosial (Midgley, 2009).

Instrumentasi kebijakan perlindungan sosial dalam konteks Indonesia belum sepenuhnya menjadikan negara sebagai aktor tunggal. Negara masih menyeimbangkan peran warga negara melalui relasi pasar tenaga kerja dan juga peran keluarga dalam menghadirkan kesejahteraan (Papadopoulos & Roumpakis, 2017). Hal ini nampak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengintegrasikan program perlindungan sosial multiaktor.

Ketentuan regulasi pada dasarnya merupakan cita-cita kebijakan sosial yang dikembangkan dalam pencapaian kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negara. Responsibilitas pemerintah menjadi garda depan dalam membangun sinergi program perlindungan sosial. Pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya pelaksanaan kebijakan tersebut. Diperlukan skala prioritas dan sinergisitas program dari sisi kepersertaan, pelayanan dan pembiayaan masing-masing

daerah untuk mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Kota Yogyakarta melalui Perda Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta memiliki program unggulan yang diberi nama Kartu Menuju Sehat (KMS). Program ini memiliki sasaran penerima manfaat adalah penduduk Kota Yogyakarta yang masuk dalam kategori tidak mampu. Sasaran program yang selektif tersebut menuntut pemerintah kota perlu menambahkan prinsip partisipatif dalam proses penjangkungannya. Hal ini dimaksudkan supaya potensi munculnya kecemburuan sosial akibat adanya program dapat diselesaikan dari awal.

Kegagalan proses penjangkungan penerima manfaat program perlindungan sosial tentunya berdampak buruk pada solidaritas sosial yang ada di masyarakat. Kekuatan solidaritas sosial berwujud modal sosial harus menjadi penopang program perlindungan sosial. Untuk itu, tulisan ini menjadi sangat penting dalam rangka untuk mengetahui relasi antara program perlindungan sosial dan modal sosial pada implementasi program KMS yang dijalankan pemerintah kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan KMS mentransformasi modal sosial yang ada di masyarakat Kota Yogyakarta.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan teknik analisis deskriptif. Pendekatan *mixed methods* menggunakan cara *sequential explanatory design* dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian secara komprehensif. Teknik ini menempatkan pendekatan kuantitatif sebagai acuan pokok dalam penggalan data kualitatif (Cresswell, 2010). Data kuantitatif diperoleh berdasarkan data penelitian “Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” yang dilakukan oleh PSKK UGM bekerja sama dengan Bakesbangpol DIY tahun 2017 dengan jumlah responden di Kota Yogyakarta sebanyak

839 orang. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan teknik survei yang mengambil sampel dari seluruh kelurahan dan perwakilan RW yang ada Kota Yogyakarta. Pada tingkat kelurahan terdapat lima responden yang terdiri dari tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, LPMK, serta unsur masyarakat. Sedangkan untuk tingkat RW yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh perwakilan RW di Kota Yogyakarta.

Tabel 1. Klasifikasi dan Jumlah Responden

| No. | Jenis Responden | Jumlah |
|------------------------|------------------|------------|
| 1. | Pengurus RW | 614 |
| 2. | Tokoh Perempuan | 45 |
| 3. | Tokoh Masyarakat | 45 |
| 4. | Tokoh Pemuda | 45 |
| 5. | LPMK | 45 |
| 6. | Masyarakat | 45 |
| Total Responden | | 839 |

Sumber : PSKK UGM, 2017

Data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada Lurah, sekretaris kelurahan, tokoh masyarakat, pengurus RW, pekerja sosial masyarakat (PSM) di lokasi yang memiliki persentase persepsi modal sosialnya tinggi dan rendah. Penentuan lokasi untuk wawancara mendalam berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya. Adapun lokasi yang terpilih adalah Kecamatan Tegalrejo untuk lokasi modal sosial tinggi dan Kecamatan Gondomanan untuk modal sosial rendah. Dari masing-masing kecamatan terpilih dikerucutkan lokasi penelitiannya pada kelurahan yang memiliki persentase modal sosial tinggi dan rendah. Untuk Kecamatan Tegalrejo terpilih Kelurahan Tegalrejo sebagai lokasi wawancara mendalam, sedangkan Kecamatan Gondomanan terpilih Kelurahan Ngupasan.

Pada bagian awal tulisan ini akan memotret kemiskinan di Kota Yogyakarta. Berikutnya akan membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui program KMS, bentuk modal sosial masyarakat di Kota Yogyakarta, dan terakhir membahas tentang dual track pengentasan kemiskinan (program KMS dan modal sosial).

B. Hasil dan Pembahasan

Potret Kemiskinan Kota Yogyakarta

Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan besar yang hingga saat ini belum tertangani secara baik di Kota Yogyakarta. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengentaskannya. Gambaran mengenai kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta cukup unik. Jika kita bandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta paling rendah, namun dari sisi ketimpangan justru yang paling tinggi (Lutfiyanti, 2018). Gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa perbaikan ekonomi di Kota Yogyakarta justru dinikmati oleh kalangan kelas tertentu dan tidak merembes pada kelompok masyarakat bawah.

Persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin masih 6.98 persen atau setara dengan 29.750 jiwa. Jumlah ini diukur dengan batas garis kemiskinan sebesar Rp. 467.061/kapita/bulan. Penggunaan parameter pengeluaran dalam mengukur garis kemiskinan dinilai memiliki kelemahan dalam melihat kemiskinan yang ada di DIY. Masyarakat DIY termasuk juga di Kota Yogyakarta memiliki budaya local yang menyebabkan parameter pengeluaran dinilai kurang tepat (Kabarkota.com, 2019).

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018.

| Variabel Kemiskinan | Kemiskinan Kota Yogyakarta | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) | 366.520 | 383.966 | 401.193 | 423.815 | 467.061 |
| Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000) | 35.6 | 36 | 32.06 | 32.2 | 29.75 |
| Persentase Penduduk Miskin | 8.67 | 8.75 | 7.7 | 7.64 | 6.98 |

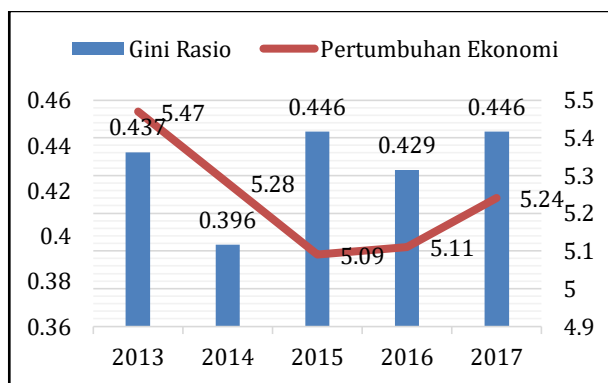
Sumber: <http://bappeda.jogjapro.go.id>

Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2017. Tercatat pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,24 persen dengan nilai Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) mencapai 31,31 triliun rupiah (BPS, 2018). Adapun sektor usaha yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier, seperti perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Sumbangan mereka terhadap PDRB sebesar 78,28 persen.

Besarnya kontribusi sektor tersier ditopang oleh pesatnya pertumbuhan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Namun sayangnya, pertumbuhan perekonomian tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan gini rasio (lihat gambar 1). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pariwisata belum dikelola secara inklusif. Ketidakselarasan antara pertumbuhan pariwisata dengan perbaikan gini rasio mengisyaratkan kepada kita bahwa perkembangan sektor pariwisata belum dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena jenis-jenis wisata yang menjadi daya tarik wisatawan kurang menimbulkan efek signifikan pada perekonomian masyarakat luas. Selain itu juga, pertumbuhan pariwisata hanya menguntungkan pada sektor perhotelan dan restoran yang itu tidak dapat diakses oleh masyarakat golongan bawah.

Gambar 1. Perbandingan Gini Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta



Sumber : <http://bappeda.jogjaprovo.go.id> dan Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2018

Pengentasan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sehat (KMS)

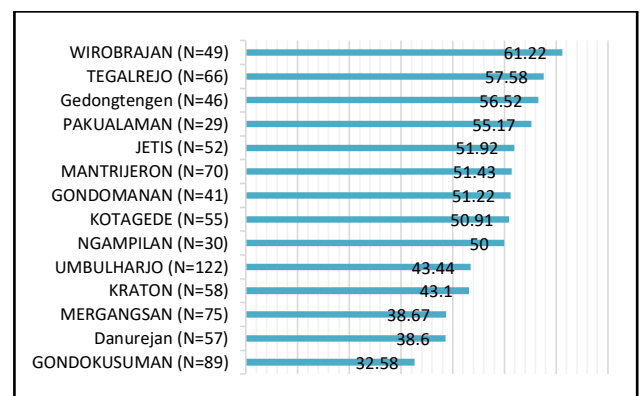
Parameter kemiskinan merupakan ukuran yang dinamis sehingga sulit untuk

dilakukan pengukuran secara tepat. Program perlindungan sosial dilakukan oleh pemerintah seringkali dalam proses penentuan penerima manfaat mengalami *inclusion* dan *exclusion error* (Devereux et al., 2017). Untuk itu perlu updating data secara reguler agar *targeting* penerima program tepat sasaran.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan proses pengumpulan data dan seleksi data tidak tepat sasaran. Faktor tersebut bisa disebabkan dari sisi pembiayaan, politik, dan sosial. Untuk menghasilkan data yang akurat pastinya akan dilakukan melalui proses pendataan yang rumit. Misalkan saja dilakukan sensus yang masing-masing populasi harus didatangi untuk diambil datanya, tentu ini tidak mudah. Ketidakakuratan data dari sisi politik disebabkan adanya intervensi kekuasaan untuk memasukkan atau tidak memasukkan sasaran program atas pertimbangan politis. Ketidakakuratan data dari sisi sosial lebih pada persoalan potensi terjadinya konflik atas proses penjarangan tersebut, sehingga data secara sadar dimanipulasi agar tidak muncul konflik dikemudian hari (Rosfadhila et al., 2013).

Banyaknya permasalahan terkait proses penjarangan tentunya akan menimbulkan gejala di masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai kurang tepat sasaran. Hampir sebagian besar kecamatan (8 dari 14 kecamatan) menyatakan bahwa program perlindungan sosial memicu potensi konflik di masyarakat (lihat grafik 3).

Gambar 2. Persentase Persepsi Masyarakat Terkait Program Perlindungan Sosial Dari Pemerintah Pusat Yang Dinilai Tidak Tepat Sasaran Dan Berpotensi Konflik (N=839)



Sumber : PSKK UGM, 2017

Ketidakakuratan data penerima manfaat program perlindungan sosial pastinya berdampak buruk pada tingkat kepercayaan masyarakat. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat merupakan langkah dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara (Marshall, 1950). Kesalahan *targeting* menjadi isu pokok yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar tidak melanggar hak-hak dasar tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari dengan potensi kesalahan data pada proses *targeting* program. Untuk itu, peran komunitas melalui partisipasi warganya perlu dilibatkan dalam proses kontrol penjaringan *targeting* program. Cara ini dinilai mampu mereduksi terjadinya kesalahan program yang berimbas pada potensi terjadinya konflik di masyarakat.

Program KMS pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensinkronkan data penerima manfaat agar lebih sistematis dan terpadu. Pemberian identitas kepada rumah tangga penerima program dimaksudkan semua program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta mampu diintegrasikan agar penerima manfaat cepat dientaskan dari permasalahan kemiskinannya.

Pemegang kartu KMS akan mendapatkan program perlindungan sosial tidak hanya pada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan semata. Namun perberdayaan rumah tangga juga menjadi prioritas. Prasyarat rumah tangga yang menjadi sasaran program ini adalah mereka yang mempunyai keterbatasan pada aspek pendapatan dan asset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Jumlah penerima KMS pada tahun 2019 sebanyak 15.282 kepala keluarga. Jumlah tersebut terdiri dari kategori miskin sebanyak 2.783 kepala keluarga dan kategori rentan miskin 12.499 kepala keluarga. Jumlah penerima KMS mengalami penurunan signifikan pada kategori miskin yang pada tahun 2018 berjumlah 4.781 kepala keluarga. Kategori rentan miskin pada KMS tahun 2019 bertambah meskipun kecil dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 12.456 kepala keluarga (harianmerapi.com, 2019).

Proses penentuan penerima KMS tidak hanya mengacu pada pendataan semata. Proses secara partisipatif juga dilakukan melalui peran komunitas pada level yang paling bawah. Utamanya peran pada tingkatan RT/RW. Proses partisipatif dalam penentuan penerima program bisa dilihat dari adanya uji public yang dilakukan. Pada tahapan uji public pertama (Bulan April), mekanisme yang dilakukan lebih pada updating data usulan dari RT/RW berdasarkan data penerima KMS pada tahun berjalan. Masing-masing RT/RW akan dikumpulkan pada sebuah forum (umumnya di balai kelurahan) untuk mencermati nama-nama kepala keluarga yang menerima program. Jika rumah tangga pada data tersebut dinilai layak maka namanya akan dipertahankan, namun jika dinilai tidak layak maka RT/RW dapat mencoretnya. Usulan penerima baru juga dapat dilakukan pada forum ini. Pengurus RT/RW dapat menambahkan nama baru jika rumah tangga dimaksud layak untuk mendapatkannya.

Kondisi yang terjadi di lapangan pada umumnya RT/RW lebih banyak mengusulkan nama baru dibandingkan dengan melakukan pencoretan. Keengganan pencoretan tersebut sangatlah beralasan karena RT/RW tidak mau menanggung resiko jika muncul protes dari warga. Kondisi ini sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu informan kami.

“pada uji public pertama kan masih nama penerima yang dulu, jadi kita diminta untuk menambahkan atau mencoret. Biasanya kami justru banyak melakukan penambahan, untuk mencoret jarang kami lakukan karena takut salah dan malah muncul protes. Biar nama kita masukkan saja, nanti biar yang mensurvei yang menentukan hasilnya”
(IG, Pengurus RW).

Peran penting dari partisipasi warga dalam melakukan kontrol terhadap data calon penerima KMS justru muncul pada hasil uji public kedua. Data dari hasil pendataan akan disampaikan kepada masing-masing kelurahan untuk dilakukan verifikasi kembali. Mekanismenya sangat beragam tergantung kondisi yang ada di lingkungan kelurahan tersebut.

Beberapa kelurahan memanfaatkan hasil uji public kedua dengan memampang daftar nama calon penerima KMS pada papan pengumuman yang ada di lingkungan RT/RW setempat. Masing-masing warga dapat mengkritisi hasil tersebut. Namun, ada juga kelurahan yang tidak melakukan hal tersebut. finalisasi data nantinya akan diputuskan pada forum resmi uji public kedua di kelurahan. Masing-masing perwakilan RT/RW akan menyetujui apakah rumah tangga yang ada dapat menerima KMS atau tidak harus di coret.

Proses yang melibatkan peran komunitas dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan dengan program yang tidak melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena warga sekitar secara langsung dapat menilai apakah sebenarnya rumah tangga tersebut layak dan tidaknya. Cerita seperti keluhan Bupati Kendal yang kesal karena banyak warganya tidak dapat PKH (Prayitno, 2019). Termasuk juga cerita dari Walikota Solo yang menilai 30 persen penerima PKH tidak tepat sasaran (Perdana, 2019) tidak terjadi.

Warga yang tidak puas dengan data PKH dan beberapa program perlindungan sosial lain pada umumnya hanya diam. Mekanisme komplain dan kontrol jarang ada yang tahu. Pada umumnya ungkapan dalam bentuk “*rasan-rasan*” atau umpatan rasa ketidakpuasan saja yang dapat dia lakukan. Keluhan dari warga yang merasa bahwa dirinya harusnya mendapatkan PKH, pada umumnya akan dijawab oleh kelurahan dengan memasukkan nama dia ke daftar calon penerima KMS. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan kami.

“Program seperti PKH, BPNT, dan lain-lain yang dari pusat memang ada yang tidak tepat sasaran. Kalau muncul konflik di masyarakat ya tidak. Palingan hanya rasan-rasan, tidak sampai ada kekerasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karna datanya dari pusat dan itu ada pendampingnya sendiri. Palingan kalau ada keluhan ya kita usulkan ke KMS” – (SL, Aparat Kelurahan).

Bentuk Modal Sosial Masyarakat di Kota Yogyakarta

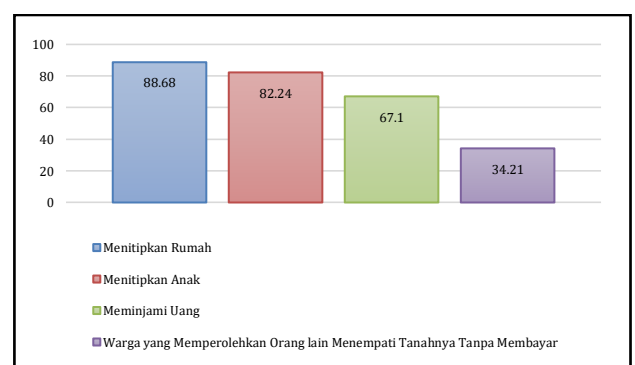
Masyarakat perkotaan sering diidentikan dengan masyarakat yang modern, multikultur,

individualistik, dan beberapa streatip lainnya. Karakteristik kehidupan perkotaan yang sangat dinamis menuntut setiap orang yang tinggal didalamnya memiliki keterbatasan waktu dalam membangun relasi dengan masyarakat yang lain. Dampaknya adalah solidaritas sosial masyarakat perkotaan menjadi sangat renggang.

Bangunan modal sosial pada umumnya terjadi karena jalinan relasi sosial yang sangat kuat antara satu orang dengan orang lain pada suatu komunitas. Jalinan tersebut yang nantinya akan memberikan keuntungan ekonomi, politik, dan sosial secara resiprokal. Pendayagunaan atas jalinan relasi tersebut menjadi sangat penting. Pendayagunaan ini juga dimaksudkan untuk berbagi resiko (risk-sharing) diantara anggota komunitas jika mendapatkan gangguan (Ng, Mirakhor, & Ibrahim, 2015).

Salah satu elemen penting terkait dengan modal sosial adalah kepercayaan diantara anggota komunitas. Kepercayaan yang tumbuh diantara mereka melalui proses yang panjang. Secara individual, kepercayaan tumbuh dan berkembang manakala ekspektasi aktor tertentu menyerahkan sebagian dari tanggungjawabnya kepada aktor yang lain dengan keyakinan bahwa aktor tersebut dapat memegang tanggungjawab dengan sebaik-baiknya (Usman, 2018).

Gambar 3. Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Atas Modal Sosial Yang Masih Berjalan (N=839)



Sumber : PSKK UGM, 2017

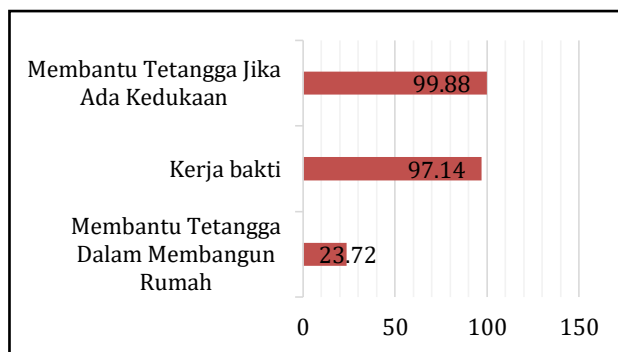
Tingkat kepercayaan masyarakat di Kota Yogyakarta terhadap orang lain pada komunitasnya (tetangga) masih sangat kuat. Hal ini nampak dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat seperti kebiasaan menitipkan rumah, menitipkan anak, dan meminjam uang. Jika kita lihat perbandingan antara beberapa aktivitas tersebut, maka kebiasaan menitipkan rumah

kepada tetangga yang paling tinggi (88,68 %), sedangkan menitipkan anak dan meminjam uang ke tetangga mengalami penurunan (82,24 % dan 67,10 %). Kondisi yang menarik disini adalah tingkat kepercayaan kepada tetangga untuk meminjam uang yang penurunannya persentasenya cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena menguatnya peran lembaga formal (perbankan) sehingga jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan uang lebih nyaman ke lembaga keuangan formal dibandingkan harus ke tetangga yang lain.

Kondisi yang menarik justru terkait pertanyaan apakah ada warga yang memperbolehkan orang lain menempati tanahnya tanpa membayar meskipun tidak ada pertalian darah. Di Kota Yogyakarta masih ada 34,21 persen yang menyatakan bahwa dilingkungannya terdapat orang yang seperti itu. Temuan ini cukup menarik manakala masyarakat perkotaan yang dinilai materialistis dan individualistis masih ada orang yang seperti itu. Tanah bagi masyarakat di perkotaan merupakan aset yang sangat berharga. Karena peluang untuk mengkapitalisasi dan mendayagunakan tanah cukup besar dan menjanjikan. Sifat kesukarelawanan yang ditunjukkan dari data ini memperlihatkan bahwa perubahan masyarakat pada dasarnya tidak serta merta mengubah/menggeser nilai-nilai sosial yang sudah ada. Namun, perubahan tersebut menyatu dalam nilai yang sudah terbangun sejak lama (Pinch & Bijker, 1984). Sehingga basis nilai-nilai kebaikan terhadap sesama masih tertanam dan diimplementasikan, walaupun konteks perubahan zaman sudah mulai menggerusnya.

Kuatnya modal sosial di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa nilai atau norma yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku mampu mendorong terciptanya kerjasama untuk kontribusi yang besar terhadap keberlanjutan bermasyarakat. Sehingga, modal sosial yang tercipta dalam relasi sosial mampu diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*) dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan *collective action* dapat dilakukan secara efisien dan efektif (Prusak & Cohen, 2004).

Gambar 4. Kegiatan Sosial yang Masih Berjalan di Kota Yogyakarta (N=839)



Sumber : PSKK UGM, 2017

Wujud *collective action* pada masyarakat Kota Yogyakarta masih sangat kuat. Kegiatan kerja bakti dan juga membantu tetangga sekitar bila ada kedukaan masih sangat tinggi. Bahkan kegiatan membantu tetangga jika ada kedukaan mencapai 99,88 persen masih aktif dilingkungannya mereka. Sedangkan kegiatan kerja bakti 97,14 persen masih aktif. Meskipun untuk kegiatan membantu tetangga dalam membangun rumah sudah jarang dilakukan (23,72 %).

Modal sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam hubungan kemasyarakatan. Peran modal sosial dapat dilihat sebagai ‘perekat’ yang menyatukan masyarakat. Masing-masing individu dalam komunitas dalam aktifitasnya memiliki keterikatan dengan sesamanya karena ada kewajiban sosial, timbal balik, dan solidaritas sosial. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya berbagi kekuatan (*power sharing*) yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma kehidupan.

Modal sosial juga memiliki peran sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Sehingga modal sosial mampu memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Munculnya disintegrasi sosial disebabkan karena potensi konflik sosial tidak dapat dikelola secara efektif dan optimal, sehingga termanifestasi dalam kekerasan. Dalam kaitannya dengan program perlindungan sosial, beberapa upaya dilakukan oleh komunitas dalam mendistribusikan kesejahteraan dalam rangka terjaganya integrasi sosial. Istilah ‘*bagi roto*’ (*bagito*), *bagi adil* (*bagidil*)’ muncul dalam praktek distribusi bantuan beras, BLT, dan program lainnya.

Praktek tersebut tidak terhindarkan manakala antar masyarakat sudah bersepakat bahwa program bantuan harus didistribusikan seperti itu. Rasa solidaritas dan rasa kebersamaan harus dikedepankan meskipun itu menyalahi ketentuan yang ada. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu informan kami.

“Dulu sebelum ada BPNT, program raskin lebih menekankan peran RW. Masyarakat disini tingkat ekonominya relative sama, akhirnya kita bagi rata (bagito), sekarang tidak bisa. Mau kompline juga tidak bisa. Katanya datanya dari pusat. Mending pendataan penerima itu melibatkan RT sehingga tau betul kondisi masyarakat”. – (AG, Pengurus RW)

Jalinan modal sosial dalam wujud *collective action* pada masyarakat Kota Yogyakarta sebenarnya cukup beragam. Keberagaman ini disebabkan karena perbedaan karakteristik masyarakat yang mendiami suatu wilayah tersebut. Masyarakat yang tinggal di kampung dan mayoritas penduduk asli, membentuk *collective action* dalam wujud kegiatan kerja bakti rutin. Jadwal kegiatan kerja bakti sangat tergantung kesepakatan yang ada di masyarakat, ada yang setiap bulan sekali dan ada yang ‘selapanan’ sekali. Aktifitas rutin ini menunjukkan bahwa modal sosial masih sangat kuat dikalangan mereka. Munculnya komitmen yang kuat antar aktor terpelihara secara baik melalui institusi sosial yang mereka kembangkan.

“kerja bakti masih berjalan baik, kalua disini setiap selapanan (35 hari). Tidak semua hadir, tetapi diupayakan ada pengganti (entah anaknya, atau wujud yang lain). Disini tidak ada sanksi apapun, takutnya malah saling tidak enak. Masyarakat pada sadar kok”. – (AR, Pengurus RW)

Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di komplek perumahan dan mayoritas pendatang. Kegiatan seperti kerja bakti dan ‘jimpitan’ sudah jarang dilakukan. Mereka melakukan kerja bakti jika ada instruksi dari kelurahan dan itu sifatnya insidental. Bagi mereka, kehidupan sehari-hari sudah disesaki dengan rutinitas pekerjaan yang padat sehingga waktu untuk bersosialisasi dan bercengkrama dengan warga yang lain sulit dilakukan. Apalagi

tempat tinggal mereka hanya untuk lokasi usaha semata. Ikatan sosial dengan lingkungan sekitar sangat longgar.

“kampong di Kelurahan Ngupasan ini ada 4, yang sebagian besar pendatang ada di Kampong Ngupasan dan Ketandan, mayoritas mereka orang China, mereka penduduk sini tetapi tinggalnya di luar Kota Yogyakarta. Pertemuan RT masih rutin tapi siang hari. Kalau untuk gotong royong, jimpitan pastinya susah. Kalau kita mau koordinasi terkadang juga susah. Kita hanya mengandalkan telpon saja”. – (LN, Aparat Kelurahan)

Kegiatan *collective action* yang lain juga menunjukkan perbedaan yang hampir sama. Kegiatan seperti ronda, jimpitan, menjenguk orang sakit antara warga yang mayoritas pendatang dan penduduk asli juga memiliki perbedaan. Kegiatan ronda di penduduk asli lebih pada pengembangan keamanan bersama sehingga instrumen keamanan formal (*security*) tidak dilakukan.

Pengembangan sikap dalam rangka memberikan keuntungan satu sama lain (*reciprocal relationship*) sangat kentara pada masyarakat yang mayoritas penduduk asli. Ikatan sosial yang muncul atas kesamaan nasib dan asal daerah membuat hubungan mereka terjalin dengan erat dibandingkan dengan masyarakat yang mayoritas pendatang, tidak heran jika aktifitas menjenguk orang sakit masih aktif di lingkungan yang ikatan sosialnya masih sangat kuat.

“Kegiatan sosial yang masih berjalan seperti jimpitan, kerjabakti, pertemuan RT, Dasawisma, Posyandu, Tilek orang sakit atau meninggal” – (IG, Pengurus RW)

“kalau orang komplek sebelah jimpitannya bulanan, kalua disini masih harian. Sehari 500 rupiah”. – (AR, Pengurus RW)

Aktivitas tatap muka secara langsung masih menjadi keharusan dalam rangka untuk membangun ikatan sosial. Karena dengan pertemuan langsung antar anggota komunitas, maka sekat antar anggota komunitas menjadi sangat tipis. Orang dengan mudah bercerita tentang kondisi keluarga, tetangga, pekerjaan,

dan sebagainya tanpa merasa bahwa apa yang diinformasikan bukan ranah pribadi. Melainkan keterbukaan informasi sangat dibuka lebar. Aktivitas berbagi informasi inilah yang menyebabkan relasi sosial sangat cair.

Tabel 4. Perbedaan *Collective Action* pada Masyarakat Mayoritas Penduduk Asli Dengan Pendatang

| Kegiatan Sosial | Kampung Komplek (Pendatang dan Ekonominya Baik) | Kampung Mayoritas Penduduk Asli dan Ekonominya Biasa |
|-------------------------------------|---|--|
| Kegiatan Kerja Bhakti | Menunggu intruksi dari kelurahan | Rutin/berkala |
| Ronda | Jarang (membayar jasa pengamanan) | Aktif |
| Jimpitan | Sistem bulanan | Sistem harian, sedikit ada yang bulanan |
| Pertemuan RT | Aktif | Aktif |
| Menjenguk orang sakit | Kenal dekat | Aktif |
| Membantu jika ada tetangga kedukaan | Aktif | Aktif |

Sumber : Analisis Data

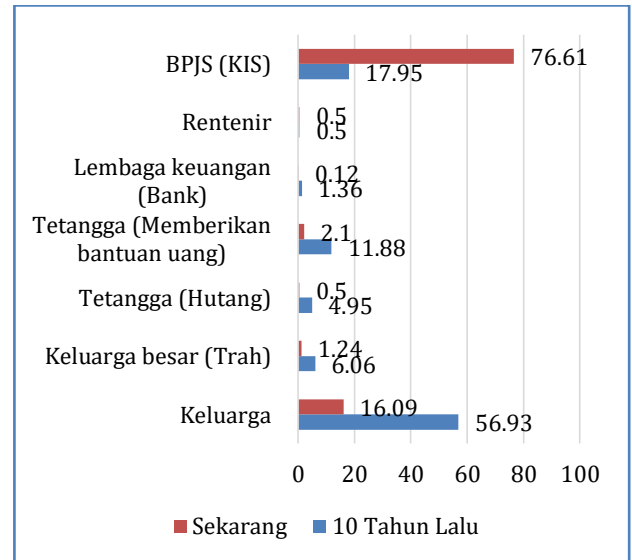
Dual Track Pengentasan Kemiskinan: KMS dan Modal Sosial

Berbicara tentang relasi program perlindungan sosial dan modal sosial pada dasarnya kita mendiskusikan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Upaya dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bersama pada masyarakat tradisional terbangun karena jalinan solidaritas sosial yang sangat kuat. Nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan antar anggota komunitas menjadi hal yang penting dalam membangun relasi sosial diantara mereka. Berbeda halnya pada masyarakat modern, dimana peran negara menjadi sangat kuat dalam upaya perlindungan sosial justru mengakibatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat menjadi lebih longgar.

Kondisi ini juga muncul pada masyarakat di Kota Yogyakarta. Pihak yang diandalkan jika ada keluarga yang sakit pada periode 10 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang (2017) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Persepsi masyarakat terkait pihak yang diandalkan jika ada keluarga yang sakit dalam 10 tahun yang lalu lebih menekankan peran keluarga dan tetangga sekitar. Berbeda halnya

dengan kondisi sekarang, peran negara dan swasta melalui program kebijakan kesejahteraan justru menguat. Relasi sosial yang awalnya terbangun secara resiprokal harus tergantikan dengan relasi yang instrumental.

Gambar 5. Pihak yang Diandalkan Jika Ada Keluarga Sakit Antara Kondisi 10 Tahun yang Lalu Dengan Sekarang (N=839)



Sumber : PSKK UGM, 2017

Program Penduduk yang Di Daftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) telah meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Dinan, 2019). Data dari BPJS Kesehatan menyatakan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta sudah 99,75 persen. Persentase tersebut merupakan capaian yang sangat baik dalam memberikan jaminan dan kepastian layanan bagi warga kota (Sudjatmiko, 2019).

Program PDPD membantu masyarakat yang tidak memiliki kepesertaan BPJS. Semua fasilitas kesehatan baik itu di Puskesmas (Faskes tingkat 1) sampai dengan pemanfaatan perawatan rumah sakit kelas 3 akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kota. Latar belakang masyarakat yang mengakses program ini tidak lagi diperhitungkan. Masyarakat terkategori mampu juga dapat mengaksesnya, karena prinsip dari program PDPD adalah mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi warga Kota Yogyakarta.

Program PDPD memberikan aturan yang ketat bagi warga yang mengaksesnya. Pasien yang menggunakan program PDPD tidak diperkenankan untuk pindah ke kelas di atasnya.

Jika ada yang melakukan hal tersebut maka secara otomatis program PDPD dinyatakan gugur.

“Kota Yogyakarta sejak tahun 2018 sudah menerapkan program perlindungan kesehatan semesta (Universal Health Care-UHC), asalkan masyarakat mau menempati bangsal kelas 3”. – (AS, Pegawai Dinsos)

Selain program-program perlindungan sosial diatas, masih banyak lagi program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, beberapa program tersebut adalah sebagai berikut : 1) Penguatan Pendidikan Mental Keluarga Miskin, program diberikan melalui pendidikan psikis yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat; 2) Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan, program dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi masyarakat miskin; 3) Pelayanan kesehatan, program diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya; 4) Pelayanan Pendidikan, program dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bertahan; 5) Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha, program bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk dan keluarga miskin serta rentan miskin supaya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha; 6) Penyediaan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni dan Sanitasi Lingkungan, program bertujuan agar penduduk dari keluarga miskin mampu penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan dan sosial; 7) Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi; dan 8) Pelayanan Jaminan Sosial, program ini bertujuan agar layanan pemenuhan

hak dasar melalui panti sosial bagi penduduk yang termasuk golongan miskin sekali atau yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

Banyaknya program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta ternyata tidak serta merta menggeser peran komunitas menjadi hilang secara keseluruhan. Sistem sosial yang sejak dahulu ada justru dijadikan cara untuk menghadirkan perlindungan sosial. Kegiatan ‘jimpitan’ yang memiliki potensi keuangan yang besar ternyata mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan oleh masyarakat.

Kegiatan santunan bagi warga yang sakit, santunan kematian, posyandu, PAUD, PKK, dan kegiatan lainnya ternyata ditopang secara finansial oleh kegiatan ‘jimpitan’. Bahkan sistem perlindungan sosial berbasis jimpitan ini sudah terlembagakan secara baik di masyarakat. sehingga pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat munculnya kepercayaan dari masyarakat.

Gambar 6. Pengelolaan Dana Jimpitan di Salah satu RW di Kelurahan Ngupasan



Sumber : Analisis Data

Mekanisme untuk pemberian bantuan dari dana jimpitan dibahas dalam forum pertemuan RT/RW yang secara berkala diselenggarakan di lingkungannya. Besaran dana jimpitan termasuk penggunaannya akan secara rutin dilaporkan pada forum tersebut. pemberian santunan bagi warga yang sakit atau meninggal berlaku secara umum, tidak peduli apakah keluarga yang mendapatkan musibah berasal dari kalangan mampu ataupun tidak.

Besaran bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terkena musibah sangat bervariasi tergantung kesepakatan bersama. Sebagai

contoh pengelolaan dana 'jimpitan' yang ada di Kampung Ratmakan Kelurahan Ngupasan memberikan bantuan kepada orang yang sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit sebesar Rp. 200.000,- dan hanya mendapatkan 2 kali untuk keluarga yang sama jika membutuhkan rawat inap berkali-kali. Sedangkan untuk santunan yang meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp. 800.000,-. Hal ini dituturkan oleh informan kami.

"Kalau ada yang meninggal, keputusan di RW akan ada sumbangan dari kas RW 800 Ribu, uang itu dari kas jimpitan yang setiap hari dikumpulkan" – (AG, Pengurus RW)

"Jika ada tetangga sakit, dari kas RW akan membantu keluarga tersebut nilainya 200 ribu, setahun maksimal 2 kali diberikan, kasusnya kalau opname". – (MM, Tokoh Masyarakat)

Selain dari santunan kas RT/RW, masyarakat juga memberikan bantuan secara pribadi. Besarnya tidak ada patokan tertentu, namun lebih menekankan pada niat keikhlasan masing-masing. Santunan pribadi ini ada yang dikumpulkan secara kolektif dan ada pula yang menyerahkan langsung. Mekanisme secara kolektif pada umumnya akan dikoordinir oleh kader di lingkungan tersebut. Petugas tersebut akan masuk ke rumah warga untuk meminta iuran. Besaran iuran yang diberikan pada umumnya Rp. 5.000,- dan dibebankan kepada tiap kepala keluarga. Uang yang terkumpul tersebut untuk selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga yang mengalami musibah.

"jika ada tetangga yang opname, nanti ada yang keliling narik'i serkileran untuk membantu dia besarnya 5 ribu per KK. Tapi kalau ada yang mau ngasih amplop sendiri dipersilahkan" – (MM, Tokoh Masyarakat)

Banyaknya program-program jaminan sosial yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa sinergitas untuk menghadirkan kesejahteraan sosial sangat terbuka lebar. Program dari pusat, daerah, bahkan komunitas secara bersama sama hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meringankan beban mereka. Untuk itu, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan potensi konflik yang

muncul maka program perlindungan sosial utamanya kebijakan pemerintah harus melihat bangunan modal sosial yang ada di masyarakat, jangan sampai dengan hadirnya program jaminan sosial justru malah mematikan modal sosial yang sudah tumbuh ratusan tahun di masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan : Cita-cita besar yang harus diwujudkan dalam rangka untuk menciptakan negara kesejahteraan adalah pemberian porsi yang cukup kepada negara untuk mewujudkannya. Negara melalui instrumen kebijakannya diharapkan mampu memenuhi segala hak dasar kebutuhan warga negara. Cita-cita ini akan sulit terwujud jika negara tersebut tidak memiliki porsi anggaran yang cukup untuk mengimplementasikannya.

Bangunan modal sosial yang sudah tumbuh di masyarakat pada dasarnya juga menjalankan fungsi distribusi kesejahteraan. Melalui sistem sosial yang resiprokal masing-masing individu dalam masyarakat akan berbagi resiko dan keuntungan untuk tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga aspek politik, sosial, maupun budaya. Transformasi masyarakat dari tradisional ke modern diharapkan tidak menggerus bangunan modal sosial yang sudah ada. Sinergitas antara kebijakan kesejahteraan dan modal sosial diharapkan mampu didayagunakan untuk pembangunan masyarakat agar lebih sejahtera.

rekomendasi :

1. Mendorong adanya koordinasi melalui basis data terpadu antara pemerintah pusat dan daerah dalam program perlindungan sosial, sehingga proses pengentasan kemiskinan lebih cepat dilakukan.
2. Mendorong perang aktif dari sector swasta melalui program csr dalam program perlindungan sosial berbasis data terpadu, sehingga focus pengentasan kemiskinan akan sama.
3. Perlu adanya kesamaan indikator dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4. Perlu adanya pelibatan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kualitas data penerima manfaat program perlindungan sosial.
5. Dalam implementasi program perlindungan sosial perlu memperhatikan bangunan modal sosial yang tumbuh dimasyarakat. jangan sampai menimbulkan potensi konflik yang akhirnya merusak modal sosial itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada yang berkenan memberikan data hasil penelitiannya utamanya kepada para peneliti yang terlibat dalam penelitian Pemetaan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY.

Pustaka Acuan

BPS. (2018). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018*. Yogyakarta.

Cresswell. (2010). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. (Terjemahan)* (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Devereux, S., Masset, E., Sabates-Wheeler, R., Samson, M., Rivas, A. M., & te Lintelo, D. (2017). The targeting effectiveness of social transfers. *Journal of Development Effectiveness*, 9(2), 162–211. <https://doi.org/10.1080/19439342.2017.1305981>

Dinan, K. (2019). PDPD, Solusi Program Layanan Kesehatan Warga Jogja. Retrieved July 11, 2019, from <https://www.starjogja.com/2019/01/11/pdpd-solusi-program-layanan-kesehatan-warga-yogyakarta/>

harianmerapi.com. (2019). PENERIMA KMS 2019 DITETAPKAN 15.282 KK - Kategori Rentan Miskin Bertambah. Retrieved July 10, 2019, from <https://www.harianmerapi.com/news/2019/01/21/49300/penerima-kms-2019-ditetapkan-15-282-kk-kategori-rentan->

miskin-bertambah

Juul, S. (2010). Solidarity and social cohesion in late modernity: A question of recognition, justice and judgement in situation. *European Journal of Social Theory*, 13(2), 253–269. <https://doi.org/10.1177/1368431010362296>

Kabarkota.com. (2019). Melihat Potret Kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Upaya Penanggulangannya | Kabarkota.com. Retrieved July 9, 2019, from <https://kabarkota.com/melihat-potret-kemiskinan-di-kota-yogyakarta-dan-upaya-penanggulangannya/>

Lutfiyanti, G. (2018). Angka Kemiskinan Kota Yogya di Bawah DIY. Retrieved July 9, 2019, from <https://jogja.tribunnews.com/2018/04/14/angka-kemiskinan-kota-yogya-di-bawah-diy>

Marshall, T. . (1950). *Marshall_Citizenship_and_Social_Class1950*. Cambridge: Cambridge University Press.

Midgley, J. (2009). *The Handbook of Social Policy*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452204024>

Ng, A., Mirakhor, A., & Ibrahim, M. H. (2015). *Social Capital and Risk Sharing*. New York: Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781137476050>

Papadopoulos, T., & Roumpakis, A. (2017). Family as a Socio-economic Actor in the Political Economies of East and South East Asian Welfare Capitalisms. *Social Policy and Administration*, 51(6), 857–875. <https://doi.org/10.1111/spol.12336>

Perdana. (2019). 30 Persen PKH Tak Tepat Sasaran, Si Kaya Masih Nikmati Bantuan. Retrieved July 10, 2019, from <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/05/15/137216/30-persen-pkh-tak-tepat-sasaran-si-kaya-masih-nikmati-bantuan>

Pinch, T., & Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts : Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. *Social Studies of Science*, 14(August), 399–441.
<https://doi.org/10.1177/030631284014003004>

Prayitno, E. (2019). Bupati Kendal Kesal Banyak Warga Miskin Tak Dapat Bantuan PKH | iNews Portal - Jateng. Retrieved July 10, 2019, from <https://www.inews.id/daerah/jateng/bupati-kendal-kesal-banyak-warga-miskin-tak-dapat-bantuan-pkh/423765>

Prusak, L., & Cohen, D. (2004). How to Invest in Social Capital. In L. Prusak (Ed.), *Creating Value with Knowledge* (Vol. 79, pp. 13–23). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/0195165128.003.0001>

Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M. (2013). *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
<https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a>

Sudjatmiko, T. (2019). 95,87 Persen Masyarakat DIY Terkover JKN-KIS. Retrieved July 11, 2019, from https://krjogja.com/web/news/read/97649/95_87_Persen_Masyarakat_DIY_Terkover_JKN_KIS

Usman, S. (2018). *Modal Sosial* (Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widgren, Ö. (1997). Social Solidarity and Social Exchange. *Sociology*, 31(4), 755–771.
<https://doi.org/10.1177/0038038597031004007>